

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

# Perda Pendidikan Segera Direvisi

## Palmerah, Warta Kota

DPRD DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan.

Revisi Perda tersebut bertujuan agar Program Sekolah Gratis di sekolah negeri dan swasta dapat terealisasi pada tahun ajaran baru, yakni Juli 2025.

"Untuk memperlancar pelaksanaan sekolah gratis di bulan Juli tahun depan,

kami akan segera menuntaskan Perda revisi dari pendidikan kita," ujar Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin pada Selasa (19/11/2024).

Khoirudin mengatakan, DPRD DKI Jakarta saat ini sedang menggelar rapat kerja komisi-komisi dalam rangka pembahasan dan pendalaman Raperda tentang APBD 2025. Termasuk di antaranya membahas program-program prioritas, seperti persoalan banjir, kemacetan, kesehatan, dan pendidikan.

Nantinya, DPRD DKI Jakarta dapat

mengawasi APBD DKI Jakarta tahun 2025 sebesar Rp 91,14 triliun benar-benar berdampak pada kesejahteraan warga Jakarta.

"Harus memastikan anggaran yang terbesar sepanjang sejarah Jakarta berdampak kepada masyarakat, pelayanan masyarakat yang lebih besar saya harus memastikan itu," jelasnya.

Sementara itu Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, dalam rapat

kerja bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengatakan, pihaknya menunggu Pemprov DKI Jakarta menyelesaikan proses administrasi Perda Nomor 8 Tahun 2006.

Dengan begitu, pembahasan mendalam soal perubahan Perda itu bisa langsung dieksekusi, dan produknya bisa diterapkan pada 2025 mendatang. "Jadi sudah bisa selesai administrasinya tahun 2025 dan mulai tahun 2025 sudah bisa mulai sekolah gratis," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Plt Kepala

Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo meminta kepada DPRD DKI Jakarta agar merevisi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pendidikan. Pasalnya, Perda tersebut nantinya akan menjadi payung hukum bagi Pemprov DKI Jakarta untuk merealisasikan Program Sekolah Gratis di negeri dan swasta.

"Saat ini bagaimana regulasinya, Perda pendidikan segera, setelah selesai kami lanjutkan dengan Peraturan Gubernur," ucapnya. **(faf)**